

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perilaku Pemilih

1. Definisi Perilaku Politik

Sikap politik seseorang terhadap objek politik yang terwujud dalam tindakan atau aktivitas politik merupakan perilaku politik seseorang. Menurut Sudijono Sastroatmodjo (1995:8) perilaku politik adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat berkaitan dengan tujuan dari suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat kearah pencapaian tujuan tersebut. Dari pengertian ini perilaku politik lebih diarahkan pada tercapainya konsensus untuk mencapai tujuan dari masyarakat dan pemerintah. Diungkapkan pula oleh Sudijono (1995:3) bahwa perilaku politik bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri tetapi mengandung ketertarikan dengan hal-hal lainnya.

Ramlan Surbakti (1992: 19) memandang perilaku politik sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dengan demikian perilaku politik merupakan tindakan masyarakat atau pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan atau pencapaian

tujuan terkait keputusan politik baik dalam proses pembuatan maupun pelaksanaannya. Sebagai insan politik setiap warga negara tentunya melakukan tindakan politik, yang dalam penelitian ini lebih difokuskan pada perilaku pemilih yang juga merupakan bagian dari perilaku politik.

2. Definisi Perilaku Pemilih

Konsep perilaku pemilih sebagaimana yang diungkapkan oleh J. Kristiadi (1996:76) adalah keterikatan seseorang untuk memberikan suara dalam proses pemilihan umum berdasarkan faktor psikologis, faktor sosiologis, dan faktor rasional pemilih (*voting behavioral theory*). Sementara menurut A.A. Oka Mahendra (2005:75) perilaku pemilih adalah tindakan seseorang ikut serta dalam memilih orang, partai politik atau isu publik tertentu. Dari konsep yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa perilaku pemilih merupakan tindakan pemilih terkait pemilihan langsung.

Ramlan Surbakti (1999:145) memandang perilaku pemilih merupakan bagian dari perilaku politik yang menggambarkan keikutsertaan warga negara dalam pemilu yang juga menjadi serangkaian kegiatan membuat keputusan yakni memilih atau tidak, dan jika memilih apakah memilih kandidat X atau kandidat Y?. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku pemilih merupakan tindakan seseorang untuk memberikan suara dalam pemilihan umum, dimana yang menjadi perhatian adalah mengapa seorang pemilih memilih partai tertentu atau kandidat tertentu dan bukan partai lainnya atau kandidat lainnya.

3. Pendekatan Perilaku Pemilih

Ramlan Surbakti (1999: 145-146) menyatakan bahwa terdapat beberapa pendekatan dalam mengkaji alasan pemilih memilih kontestan tertentu dalam pemilihan diantaranya:

- a. Pendekatan Struktural yang melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial (struktur sosial yang menjadi sumber kemajemukan politik dapat berupa kelas sosial, agama, bahasa dan nasionalisme), sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan, dan program yang ditawarkan oleh setiap partai.
- b. Pendekatan Sosiologis yang cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. dimana pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi seperti jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan kelas, pendapatan dan agama.
- c. Pendekatan Ekologis yang hanya relevan jika dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial.
- d. Pendekatan Psikologi Sosial berupa identifikasi partai dimana partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor lain.
- e. Pendekatan Pilihan Rasional yang melihat kegiatan memilih merupakan produk kalkulasi untung dan rugi.

Pengklasifikasian pendekatan untuk melihat perilaku pemilih juga dikemukakan oleh Adman Nursal (2004:54), secara umum terbagi atas empat pendekatan yakni pendekatan sosiologis disebut sebagai Mazhab Columbia (*The Columbia of Electoral Behavioral*), pendekatan psikologis disebut sebagai Mazhab Michigan (*The Michigan Survey Research Center*) dan pendekatan rasional serta pendekatan domain kognitif (pendekatan *marketing*)

3. 1 Pendekatan Sosiologis (Mazhab Columbia)

Pendekatan Sosiologis atau disebut juga mazhab columbia sebagaimana dikemukakan oleh A.A. Oka Mahendra (2005:75) menyatakan bahwa latar belakang pilihan atas partai, calon dan isu ditentukan oleh karakteristik sosial pemilih. Misalnya agama, etnik atau kedaerahan, dimana seseorang akan memilih partai atau tokoh tertentu karena ada kesamaan karakteristik sosial antara pemilih dan karakteristik sosial tokoh atau partai yang dipilih.

Sejalan dengan pendapat di atas, Muhammad Asfar dalam Adman Nursal (2004:55) mengungkapkan lebih dalam bahwa,

“Pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial - usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal dan lainnya – mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam pembentukan perilaku pemilih”.

Sedangkan menurut Khoirudin (2004:96) pendekatan sosiologis melihat masyarakat sebagai satu kelompok yang bersifat *vertical* dari

tingkat yang terbawah hingga teratas dimana menurut paham ini tingkatan-tingkatan atau kelompok yang berbeda inilah yang membentuk persepsi, sikap, keyakinan, dan sikap politik dari masing-masing individu. Hal ini menunjukkan bahwa subkultur tertentu dalam masyarakat memiliki kognisi sosial tertentu yang akhirnya bermuara pada perilaku tertentu.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model sosiologis mengasumsikan bahwa perilaku pemilih ditentukan oleh karakteristik sosial dan pengelompokan sosial pemilih dan karakteristik sosial tokoh atau partai yang dipilih atau dengan kata lain, pemilih memiliki orientasi tertentu terkait karakteristik dan pengelompokan sosialnya dengan pilihan atas partai atau calon tertentu. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh pendekatan ini adalah sebagai berikut :

1. Pengelompokan sosial dilihat dari pola hubungan sosial seperti hubungan pertemanan, kekeluargaan dan kekerabatan serta kelompok sosial lainnya seperti profesi dan organisasi yang diikuti.
2. Karakteristik sosial yang dilihat orientasi pemilih terhadap karakteristik sosial kandidat seperti usia, jenis kelamin, agama, etnis dan lain-lain.

Mengenai pengkategorian karakteristik sosial dan pengelompokan sosial ini dibagi menjadi tiga tipe oleh Bone dan Ranney dalam Adman Nursal (2004:56) yakni kelompok kategorial yang terdiri atas orang-orang yang memiliki karakteristik politik yang berbeda-beda dan tidak menyadari karakteristik dan tujuan kelompoknya, dimana perbedaan ini terjadi karena masing-masing kategori memberi reaksi yang berbeda terhadap peristiwa politik, pengalaman politik dan peran-peran sosial. Pengelompokan kategorial ini terbentuk atas dasar faktor-faktor berikut :

- a. Perbedaan jenis kelamin
- b. Perbedaan Usia
- c. perbedaan Pendidikan

Kategori kedua adalah kelompok sekunder yakni kelompok yang menyadari identifikasi dan tujuan kelompoknya dan terdapat ikatan psikologis anggota terhadap kelompoknya, kelompok ini diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pekerjaan
- b. Kelas sosial dan status sosial ekonomi
- c. kelompok-kelompok etnis seperti ras, agama, dan daerah asal.

Tipe kelompok yang terakhir adalah kelompok primer yang terdiri atas orang-orang yang melakukan kontak dan interaksi langsung secara teratur dan sering, kelompok ini memiliki pengaruh yang paling kuat dan langsung terhadap perilaku politik seseorang. Mereka yang tergolong kelompok ini adalah :

- a. Pasangan suami istri
- b. Orang tua dan anak-anak
- c. Teman sepermainan

3. 2 Pendekatan Psikologis (Mazhab Michigan)

Pendekatan psikologis atau yang sering disebut juga mazhab michigan sebagaimana diungkapkan oleh A.A. Oka Mahendra (2005:76) bahwa,

“faktor-faktor sosiologis seperti kesamaan agama atau etnik tidak akan fungsional mempengaruhi keputusan pemilih, jika sejak awal belum terbentuk persepsi dan sikap pribadi pemilih terhadap faktor-faktor sosial, maupun terhadap faktor sosial yang dilekatkan pada partai atau calon tertentu. Harus sudah terbentuk dalam diri pemilih bahwa dirinya termasuk dalam satu golongan atau segmen sosial tertentu, sekaligus terbentuk persepsi dari diri yang bersangkutan bahwa partai atau figur tertentu juga diidentikkan dengan kelompok atau segmen sosial yang sama dengan diri mereka”.

Menurut Adman Nursal (2004:59) mazhab ini menggarisbawahi adanya sikap politik para pemberi suara yang menetap, teori ini dilandasi oleh sikap dan sosialisasi. Sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku politiknya. Terbentuknya persepsi dan sikap ini diawali dengan proses sosialisasi yang panjang yang membentuk ikatan yang kuat dengan partai politik dan menimbulkan identifikasi tanpa disadari.

Model psikologis menggunakan konsep kunci yakni identifikasi partai yang mana proses sosialisasi yang dijalani akan membentuk ikatan psikologis seseorang dengan partai politik atau kandidat tertentu. Identifikasi partai merupakan rasa keterikatan individu terhadap partai sekalipun ia bukan anggota. Perasaan itu tumbuh sejak kecil dipengaruhi oleh orang tua dan lingkungan keluarga. Dengan demikian

pendekatan ini saling terkait dengan pendekatan sosiologis dimana identifikasi partai berkaitan dengan pengelompokan sosial.

Berdasarkan konsep tindakan komunikasi Dann Nimmo dalam Adman Nursal (2004:61) menyebut pemilih yang dipengaruhi oleh faktor identifikasi ini sebagai pemberi suara reaktif. Nimmo mengasumsikan bahwa,

“manusia beraksi terhadap rangsangan secara pasif dan terkondisi, perilaku pemberi suara dibentuk oleh faktor jangka panjang terutama faktor sosial. Pengelompokan sosial dan demografi berkorelasi dengan identifikasi partai. Hal ini karena karakter kelompok sosial dan demografi dimana pemilih berada memberi pengaruh sangat penting dalam proses pembentukan ikatan emosional pemilih dengan simbol-simbol partai. Simbol-simbol kelompok dan ikatan kesejarahan dapat melekat pada simbol-simbol partai sehingga tercipta identifikasi”.

Faktor emosional sangat menentukan pembentukan perilaku pemilih dalam pendekatan ini, yang melibatkan peran keluarga dan lingkungan sekitar individu yang berperan aktif dalam proses sosialisasinya. Dalam hal ini, pola hubungan yang merupakan bentukan budaya juga mempengaruhi emosional pemilih seperti halnya tokoh panutan yang menimbulkan identifikasi. Gerungan dalam Adman Nursal (2004 :59-60) menyebutkan bahwa identifikasi adalah dorongan untuk identik dengan orang lain yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang dianggapnya ideal dalam suatu segi. Sehingga faktor ketokohan juga berpengaruh kuat dalam membentuk perilaku pemilih.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Pendekatan Psikologis yaitu pendekatan yang melihat perilaku pemilih sebagai bentukan dari

proses sosialisasi yang melahirkan ikatan emosional (identifikasi) yang mengarahkan tindakan politik seseorang dalam suatu pemilihan. Indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh pendekatan ini adalah sebagai berikut :

1. Ketokohan, dilihat dari perasaan emosional pemilih yang melandasi pilihannya dengan mempertimbangkan identitas atau ketokohan calon (atau tokoh dibelakang calon) dan tokoh-tokoh panutan yang dihormati oleh pemilih.
2. Identifikasi Partai, yang dilihat dari kesamaan pandangan responden dengan anggota keluarganya terhadap pilihan tertentu serta adanya kesamaan antara partai yang dipilih dengan partai yang dikagumi.

3.3 Pendekatan Rasional (Ekonomis)

Jika pendekatan psikologis menjelaskan adanya pemilih tetap, sebagian pemilih juga ada yang merubah pilihannya dari pemilu ke pemilu lainya. Peristiwa-peristiwa politik tertentu bisa merubah preferensi pilihan politik seseorang, hal inilah yang dijelaskan oleh pendekatan rasional. Adman Nursal (2004:64) menyebutkan bahwa

“pendekatan rasional terutama berkaitan dengan orientasi utama pemilih, yakni orientasi isu dan orientasi kandidat. Perilaku pemilih berorientasi isu berpusat pada pertanyaan: apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan Negara. Sementara orientasi kandidat mengacu pada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat tanpa mempedulikan label partai”.

Pengaruh isu dan kandidat itu antara lain berkaitan erat dengan peristiwa sosial, ekonomi dan politik tertentu yang kontekstual dengan pemilihan yang bersangkutan, sementara pendekatan rasional terhadap kandidat bisa didasarkan pada kedudukan, informasi, prestasi dan popularitas pribadi bersangkutan dalam berbagai bidang kehidupan. Kualitas kandidat memiliki dua variabel, yakni kualitas instrumental yaitu tindakan yang diyakini pemilih akan direalisasikan oleh kandidat bila telah menang dalam pemilihan, dan variabel kualitas simbolik, yaitu kualitas kepribadian seseorang yang berkaitan dengan integritas diri, ketegasan, ketaatan pada norma dan aturan, kebaikan, sikap merakyat dan sebagainya.

Pendekatan rasional mengantarkan pada kesimpulan bahwa para pemilih benar-benar rasional. Para pemilih melakukan penilaian yang valid terhadap tawaran partai. Berdasarkan tindakan komunikasi dalam Adman Nursal (2004:66) Nimmo menggolongkan para pemilih ini sebagai pemberi suara yang rasional. Pemilih rasional ini memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan dan mendapatkan informasi yang cukup. Tindakan mereka bukanlah karena faktor kebetulan dan kebiasaan, bukan untuk kepentingan sendiri melainkan untuk kepentingan umum menurut pikiran dan pertimbangan logis.

Pendekatan rasional merupakan pendekatan yang melihat bahwa pilihan pemilih adalah keputusan rasional pemilih dimana yang dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

1. Orientasi Visi Misi yang diukur dari pengetahuan dan pemahaman serta ketertarikan pemilih terhadap program yang ditawarkan calon.
2. Orientasi Kandidat yang diukur dari kualitas kandidat meliputi kedudukan, informasi, prestasi dan popularitas pribadi bersangkutan dalam berbagai bidang kehidupan terkait kompetensinya dalam merealisasikan program yang ditawarkan.

3.4 Pendekatan *Marketing*

Dalam Adman Nursal (2004:69-71) menurut pendekatan yang dikembangkan oleh Newman dan Sheth ini terdapat tujuh domain kognitif terpisah dan berbeda yang mempengaruhi perilaku pemilih yakni :

- a. Isu dan kebijakan politik (*issues and policies*), merepresentasikan kebijakan atau program yang diperjuangkan dan dijanjikan oleh partai atau kandidat politik jika menang kelak.
- b. Citra sosial (*social imagery*), menunjukkan stereotif kandidat atau partai (citra kandidat atau partai di mata pemilih) untuk menarik pemilih dengan menciptakan asosiasi antara kandidat atau partai dengan segmen-segmen tertentu dalam masyarakat.
- c. Perasaan emosional (*emotional feelings*), dimensi emosional yang terpancar dari kontestan yang ditunjukkan oleh kebijakan politik yang ditawarkan.

- d. Citra kandidat (*candidate personality*), mengacu pada sifat-sifat pribadi yang penting yang dianggap sebagai karakter kandidat.
- e. Peristiwa mutakhir (*current events*), mengacu pada himpunan peristiwa, isu, dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye.
- f. Peristiwa personal (*personal events*), mengacu pada kehidupan pribadi dan peristiwa yang pernah dialami secara pribadi oleh seorang kandidat.
- g. Faktor-faktor epistemic (*epistemic issues*), isu-isu pemilihan yang spesifik yang dapat memicu keingintahuan para pemilih tentang hal-hal baru.

Pendekatan ini merupakan bentuk strategi baru dalam menjaring suara dalam pemilihan, dimana fokus pendekatan ini melihat pemilihan langsung sebagai pasar yang didalamnya setiap kontestan harus mampu menguasai perilaku konsumen (pemilih) dan mampu menawarkan segala hal yang menjadi kebutuhan konsumen.

Beberapa hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan seorang pemilih dalam menentukan pilihannya dalam suatu pemilihan langsung. Secara umum berdasarkan hal-hal di atas keempat pendekatan ini, pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, pendekatan rasional dan pendekatan *marketing*, terdapat keterikatan dan satu sama lain saling melengkapi. Pembagian pendekatan perilaku pemilih secara umum terbagi atas tiga yakni :

- a. Pendekatan Sosiologis
- b. Pendekatan Psikologis
- c. Pendekatan Rasional

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga model atau pendekatan perilaku pemilih yang terdiri atas pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional. Kemudian akan diukur besarnya pengaruh dari ketiga faktor atau variabel ini terhadap perilaku pemilih dalam pemilihan *peratin* Pekon Kuripan Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Lampung Barat Tahun 2009. Hal ini dikarenakan pendekatan ini harus disesuaikan dengan kondisi lokasi penelitian yang berada di pedesaan sehingga tendensi memilih lebih mengarah pada ketiga pendekatan tersebut dan objek penelitian yakni pemilihan *peratin* atau setingkat kepala desa, dimana pendekatan *marketing* tidak begitu ditampakkan oleh kontestan mengingat ruang lingkungannya tidak terlalu luas dan faktor kultur dalam masyarakat masih mendominasi.

B. Tinjauan Tentang Perilaku Pemilih di Indonesia

Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi perilaku pemilih di Indonesia. Seperti halnya orientasi pemilih yang terdiri atas beberapa faktor sebagaimana dijelaskan dalam Adman Nursal (2004:80-98) dibawah ini diantaranya adalah:

a. Orientasi agama

Agama merupakan salah satu faktor penting pembentukan perilaku pemilih di Indonesia. sejumlah penelitian menunjukkan bahwa agama memiliki korelasi nyata dengan perilaku pemilih. Kenyataan bahwa dukungan terhadap gagasan partai islam berkaitan erat dengan ketaatan

pemilih dalam menjalankan ibadah diperkuat oleh penelitian Afan Gaffar terhadap perilaku pemilih di pedesaan Jawa dan penelitian Suwondo terhadap perilaku pemilih masyarakat perkotaan Bandar Lampung.

Korelasi ini dapat dilihat dimana terdapat kecenderungan yang kuat dukungan kaum santri terhadap partai islam, untuk itu dapat disimpulkan bahwa orientasi *sosio religious* mempunyai korelasi nyata terhadap perilaku pemilih, khususnya pemilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tahun 1992. Meskipun pasca orde baru korelasi antara *sosio religious* dan pilihan politik mencair, penelitian Liddle dan Saiful Mujani (*Kompas*, 1 September 2000) menyimpulkan bahwa antara perbedaan agama diantara pemilih mempunyai korelasi signifikan, walaupun lemah, terhadap perbedaan pemilihan partai.

b. Kelas sosial dan Kelompok sosial lainnya

Faktor kelas dapat dianggap penting oleh partai politik. Hal ini dapat dilihat pada pendukung Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dimana mereka mengaitkan PDI sebagai partai *wong cilik*, dan hasil penelitian Afan Gaffar juga menyatakan bahwa 13% responden menyatakan bahwa PDI adalah partai yang mewakili kepentingan kalangan miskin. Faktor sosial lainnya yang juga menjadi perhatian penting terkait pilihan politik adalah usia dan jenis kelamin.

c. Faktor kepemimpinan dan Ketokohan

Pemimpin dapat dibedakan menjadi pemimpin formal (resmi) dan pemimpin informal yang biasa disebut tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Garis kepemimpinan menjadi salah satu hal yang dapat menentukan pilihan seseorang dalam pemilihan langsung. Baik pemimpin formal maupun informal, memiliki kekuatan untuk menggerakkan masyarakat mencapai tujuan tertentu, termasuk mempengaruhi perilaku pemilih.

Dalam Adnan Nursal (2004:91) disebutkan bahwa peranan kepala desa, kepala kelurahan dan sosok-sosok pemimpin desa lainnya diperkirakan masih tetap memiliki pengaruh signifikan dalam mempengaruhi perilaku warga desa. Pengaruh ini akan terlihat nyata di lingkungan pedesaan yang jauh dari perkotaan. Dalam Ramlan Surbakti (1992:146) disebutkan bahwa kepemimpinan tradisional memang menjadi salah satu pertimbangan dalam melihat perilaku pemilih di beberapa negara berkembang.

d. Faktor identifikasi

Aspek identifikasi partai memberi pengaruh cukup kuat terhadap pilihan partai politik. Hal ini ditunjukkan oleh kesamaan pandangan responden dengan anggota keluarganya, hal lain yang mengindikasikan ini adalah adanya kesamaan antara partai yang dipilih dengan partai yang dikagumi. dalam era reformasi dimana yang dipilih dalam pemilihan umum adalah kandidat secara langsung, tidak terlalu

memfokuskan pilihan pada partai, identifikasi menjadi faktor penting untuk memahami perilaku pemilih.

e. Orientasi isu

Pada pemilu era reformasi, faktor isu dan program memberi pengaruh signifikan terhadap perilaku pemilih, terutama pada pemilih kalkulatif. Disamping karena besarnya perhatian masyarakat terhadap persoalan yang dihadapi bangsa, strategisnya faktor isu disebabkan juga oleh kebebasan setiap partai politik atau kandidat untuk mengemas isu dan programnya. Pada umumnya penguatnya pengaruh faktor isu ini disebabkan oleh meningkatnya pendidikan atau daya kritis masyarakat.

f. Orientasi kandidat

Dalam pemilihan langsung, calon yang berasal dari unit wilayah pemilihan bersangkutan, tentunya lebih dikenal oleh para pemilih. Faktor kandidat ini akan memberi pengaruh besar terhadap perilaku pemilih. Hal ini juga dijelaskan dalam beberapa pendekatan bahwa *social imagery* kandidat menjadi hal yang diperhitungkan oleh pemilih, terutama di daerah pedesaan, bagi kandidat kepala desa, *personality candidat* juga menjadi hal yang penting sebagai referensi utama bagi pemilih.

g. Kaitan dengan peristiwa

Faktor lain yang tak bisa diabaikan adalah kaitan isu dan kandidat yang diajukandengan peristiwa-peristiwa yang masih mempengaruhi pikiran para pemilih. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan perilaku

pemilihan tidak selalu mempunyai cakupan nasional. Peristiwa-peristiwa lokal tertentu sangat mempengaruhi perilaku pemilih di tingkat lokal. Peristiwa lokal seringkali hanya dipahami oleh masyarakat lokal setempat dan berbeda karakternya dengan peristiwa nasional. Terutama dalam pemilihan kepala desa, hal-hal mendasar mengenai integritas desa, peristiwa yang menyentuh kepentingan dasar bagi suatu desa akan menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk memutuskan pilihan.

Beberapa hal inilah yang banyak mempengaruhi pemilih dalam memutuskan pilihan dalam pemilihan langsung di Indonesia. Beberapa aspek di atas juga dapat ditemukan pada perilaku pemilih masyarakat Pekon Kuripan dalam pemilihan *peratin* tahun 2009.

C. Tinjauan Tentang Pemilihan *Peratin Pekon*

1. Definisi Pemilih

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 68 disebutkan bahwa pemilih adalah warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pada Pasal 69 dijelaskan bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Seorang warga negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya. Sementara dalam Ketentuan umum Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2006 disebutkan bahwa pemilih adalah penduduk pekon yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya. Sedangkan yang dimaksud dengan hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan setiap pilihannya.

Pada Pasal 22 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2006 disebutkan pula bahwa seseorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih dan seorang pemilih yang berhalangan hadir karena suatu alasan tidak dapat diwakilkan.

2. Definisi *Peratin Pekon*

Dalam ketentuan umum Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pemilihan dan Penetapan *Peratin*, disebutkan bahwa *peratin* adalah Kepala *Pekon* dalam Kabupaten Lampung Barat, sementara *Pekon* merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa *peratin* merupakan pemimpin dalam suatu kesatuan masyarakat yang disebut *Pekon*.

Sementara *Peratin* sebagaimana layaknya kepala desa berkedudukan sebagai perangkat *pekon*, dengan beberapa tugas, kewenangan, kewajiban dan hak sebagaimana kepala desa. Hal ini tercantum dalam PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa pada Pasal 14 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - (1) memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - (2) mengajukan rancangan peraturan desa;
 - (3) menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - (4) menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - (5) membina kehidupan masyarakat desa;
 - (6) membina perekonomian desa;
 - (7) mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - (8) mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - (9) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pada Pasal 15 dijelaskan bahwa :

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Peratin merupakan pemimpin *pekon* yang juga merupakan tokoh sentral di *pekon* yang berperan dominan dalam menentukan arah kemajuan pembangunan *pekon*, pemersatu, dan pengayom masyarakat *pekon*.

3. Definisi Pemilihan *Peratin Pekon*

Menurut Sadu Wasistiono (2006:32) Pemilihan kepala desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan hak asal usul yang merupakan kewenangan asli desa, sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi yang paling hakiki.

Pemilihan kepala desa sebagaimana pemilihan langsung pada umumnya merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin dimana masyarakat memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang didukungnya, melalui pemilihan ini, legitimasi pemerintah dikukuhkan, karena pemilihan langsung merupakan hasil pilihan warga yang berdaulat. Jadi yang dimaksud dengan Pemilihan *Peratin Pekon* adalah mekanisme demokrasi ditingkat *pekon* dalam rangka rekrutmen pemimpin dimana masyarakat *pekon* memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon *peratin* yang didukungnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 46 disebutkan bahwa kepala desa atau yang disebut dengan nama lain (*Peratin*) dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat dan pemilihan ini bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Secara mendalam penjelasan tentang sifat pemilihan yang terdiri atas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil adalah :

- a. Langsung, adalah setiap pemilih secara langsung memberikan suaranya tanpa perantara dan tak dapat diwakilkan.
- b. Umum, pemilihan itu berlaku bagi seluruh warga yang memenuhi persyaratan.
- c. Bebas, warga Negara yang berhak memilih dapat menggunakan haknya dan melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan, dan paksaan dari orang lain.
- d. Rahasia, pilihan setiap pemilih dijamin kerahasiaannya.
- e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilihan penyelenggara, pemilih dan seluruh yang terlibat dalam proses pemilihan harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan pertaturan perundangan yang berlaku.
- f. Adil, setiap pemilih dan peserta pemilihan mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pencalonan *Peratin* ini harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana yang disebutkan dalam Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 9 ayat 1 bahwa yang dapat dipilih menjadi *Peratin* adalah Penduduk Pekon Warga Negara Republik Indonesia yang:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, undang-undang dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Tidak terlibat langsung atau tidak dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat dan khusus untuk Pekon sebagai ibukota kecamatan sekurang-kurangnya SLTA/sederajat.
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setingginya 60 tahun;
- f. Sehat Jasmani dan rohani;
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Pekon setempat;
- l. Bersedia dicalonkan menjadi *Peratin*;

Pemilihan *peratin* ini dilaksanakan dengan mencoblos tanda gambar calon dalam bilik suara yang telah disediakan panitia dan tahapan pemilihan *peratin* ini melalui tahap pencalonan, tahap penetapan calon, kampanye, tahap

pemilihan, serta pengesahan dan penetapan dimana rangkaian ajang demokrasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan pemimpin yang representatif dan berkualitas.

D. Kerangka Pikir

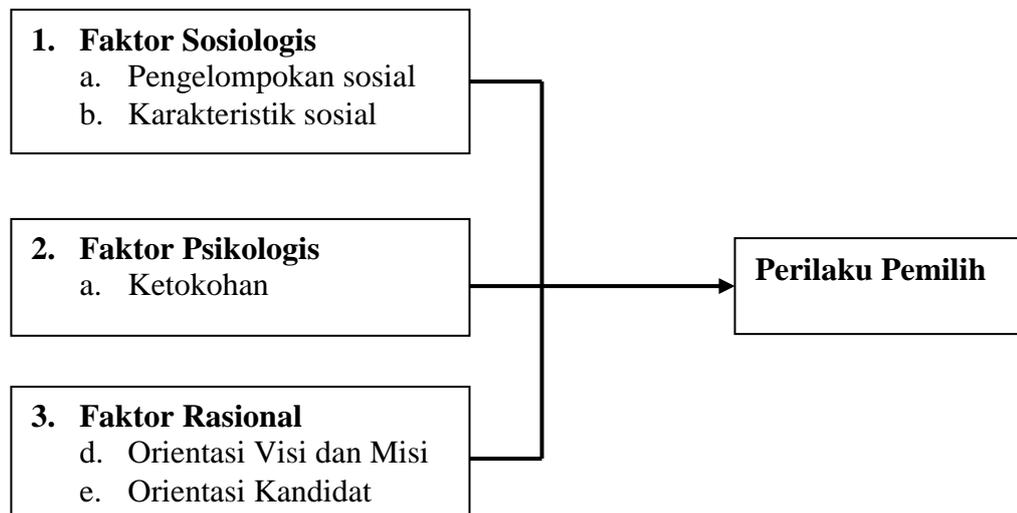
Perilaku pemilih merupakan tindakan individu dalam memberikan suara pada pemilihan langsung, dimana hal ini menyangkut keputusan individu untuk menjatuhkan pilihan kepada kandidat atau partai tertentu yang dianggap tepat untuk menduduki jabatan politis tertentu. Dalam kehidupan politik masyarakat desa terutama menyangkut perilaku pemilih dalam pemilihan kepala desa, dalam hal ini pemilihan *peratin pekon*, banyak faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan diantaranya visi misi calon, dan kualitas kandidat, faktor budaya (*sosio cultural*) dan peran pemimpin tradisional juga merupakan hal yang perlu diperhatikan disamping beberapa faktor umum lainnya.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perilaku pemilih yang terdiri atas tiga pendekatan yakni pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis dan pendekatan rasional untuk memudahkan penulis dalam mengetahui dan memahami Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih dalam Pemilihan *Peratin Pekon* Kuripan Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Lampung Barat Tahun 2009. Ketiga pendekatan ini diturunkan menjadi faktor-faktor digunakan untuk mengukur pola perilaku pemilih masyarakat *Pekon Kuripan* dengan indikator sebagai berikut :

1. Faktor sosiologis yang diukur dari pengelompokan sosial dan karakteristik sosial.
2. Faktor psikologis yang diukur dari indikator ketokohan.
3. Faktor rasional yang diukur dari orientasi visi dan misi serta orientasi kandidat.

Dengan 5 (lima) indikator dari ketiga faktor perilaku pemilih tersebut, penelitian ini mencoba menggambarkan dan menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam pemilihan *peratin* Pekon Kuripan Tahun 2009 dan seberapa besar pengaruh dari ketiga faktor tersebut.

Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat dibuat bagan kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pikir

E. Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis bahwa diduga faktor sosiologis, psikologis dan rasional pemilih berpengaruh terhadap Perilaku pemilih. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H₀ : Faktor sosiologis, faktor psikologis dan faktor rasional pemilih tidak berpengaruh terhadap perilaku pemilih dalam pemilihan *peratin* Pekon Kuripan Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Lampung Barat Tahun 2009.
- H_a : Faktor sosiologis, faktor psikologis dan faktor rasional pemilih berpengaruh terhadap perilaku pemilih dalam pemilihan *peratin* Pekon Kuripan Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Lampung Barat Tahun 2009.